

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Partisipasi warga negara dalam pengelolaan negara seringkali diwujudkan melalui partai politik. Saat ini, partai politik menjadi sarana bagi politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks politik demokratis kontemporer, partai politik berperan sebagai elemen krusial. Partai politik dianggap sebagai syarat utama pembentukan negara demokratis. Meskipun partai politik juga terdapat di negara otoriter, namun perannya sangat beragam. Di negara demokrasi, partai politik memiliki fungsi vital dalam memastikan integritas politik sesuai dengan kerangka sosial masyarakat. Partai politik memberikan kesempatan bagi kita untuk memahami kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu ilmuwan politik yaitu V.O. Maurice Duverger dalam Surbakti (2010): "Menurutnya partai politik bukanlah komunitas, tetapi kumpulan dari komunitas, di dalam tubuh partai politik hadir berbagai kelompok kecil masyarakat yang menyebar ke berbagai pelosok suatu negara dalam bentuk kaukus, cabang partai atau asosiasi lokal pendukung partai" . Kelompok yang terdiri dari individu-individu yang mengidentifikasi diri sebagai anggota partai muncul dalam basis pemilih. Sekelompok profesional dapat disebut sebagai pihak dalam arti lain. Partai terkadang bisa merujuk pada faksi di dalam pemerintahan. Partai dapat mencakup organisasi politik profesional, partai politik di lembaga legislatif, partai politik di lembaga eksekutif, dan partai politik di

lingkungan pemilih. Meskipun demikian, istilah "partai" sering kali mengacu pada berbagai organisasi baik secara operasional maupun analitis, oleh karena itu kita harus mendefinisikan penggunaan istilah ini.

Di negara-negara demokratis, partai politik mempunyai empat tujuan utama: sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, dan penyelesaian perselisihan. Dari keempat peran yang dijalankan oleh partai politik, pengaruhnya terhadap masyarakat di sektor politik paling nyata dalam sosialisasi dan komunikasi. Selain itu, partai politik memiliki tanggung jawab penting dalam merekrut anggota baru untuk mengisi jabatan internal serta membina pemimpin masa depan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Partai politik dan demokrasi adalah dua elemen yang saling terkait erat, sehingga diskusi tentang keduanya tidak bisa dipisahkan. Karena demokrasi pada umumnya mengatur bahwa wakil atau pemimpin rakyat dipilih langsung oleh rakyat.

Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin mereka melalui persaingan untuk mendapatkan suara dan kepatuhan terhadap konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Demokrasi adalah kemampuan rakyat untuk memilih sendiri pemimpin politiknya. Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang demokratis, dan dari segi sistem kepartaian menganut sistem multi partai dimana lebih dari dua partai diperbolehkan membentuk partai politik. Hal ini menyebabkan persaingan yang ketat untuk mendapatkan kursi di legislatif dan pemerintahan di tingkat lokal dan nasional. Empat partai politik baru diakui sebagai partai politik yang sah di Indonesia setelah mereka terpilih dan mendapat pengakuan hukum pada pemilu 2019. Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia

(PSI), Partai Berkarya, dan Partai Garuda merupakan empat partai politik yang baru terbentuk. Berbeda dengan pemilu tahun 2014 yang jumlah partai politiknya lebih sedikit dibandingkan pemilu tahun 2019, kemunculan empat partai politik baru ini menunjukkan bahwa iklim politik tanah air sudah membaik.

Kehadiran empat partai politik baru dalam Pemilu 2019 meningkatkan persaingan, khususnya dalam pemilihan anggota legislatif DPRD Kota Tasikmalaya. Pemilu tersebut tercatat memiliki atmosfer politik yang sangat dinamis dan kompetitif, ditandai dengan pemilihan anggota legislatif yang berlangsung serentak dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menariknya, PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, serta kemenangan Joko Widodo dalam dua periode pemilu, memberikan keuntungan bagi calon legislatif dari PDI-P. Hal ini memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk melihat sosok Presiden yang berasal dari PDI-P.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) didirikan pada 10 Januari 1973 dan memainkan peran penting dalam politik Indonesia. Pada Kongres Nasional tahun 1993, Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang merupakan salah satu dari tiga partai yang diakui oleh pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Meskipun pemerintah tidak mengakui hasil pemilihan ini dan mendukung Budi Harjono sebagai ketua umum, Megawati tetap terpilih. Upaya pemerintah untuk mengadakan kongres khusus guna memilih Harjono gagal, dan Megawati kembali terpilih.

Kepemimpinannya diperkuat ketika Majelis Nasional PDI mengesahkan hasil kongres tersebut.

Pada Juni 1996, Kongres Nasional PDI digelar di Medan, tetapi Megawati Soekarnoputri tidak diundang dan hanya anggota-anggota yang menentang yang hadir. Suryadi, didukung oleh pemerintah, terpilih kembali sebagai Ketua Umum PDI. Megawati tidak mengakui hasil kongres tersebut dan tetap menganggap dirinya sebagai pemimpin yang sah dari PDI. Kemudian, pada tanggal 27 Juli 1996, Suryadi mengancam akan merebut kembali kantor pusat PDI di Jakarta. Pendukungnya, yang diduga mendapatkan dukungan dari pemerintah, menyerbu kantor pusat PDI dan berhadapan dengan pendukung Megawati yang telah berkumpul di sana sejak Kongres Nasional di Medan. Dalam bentrokan yang terjadi, pendukung Megawati berhasil mempertahankan kantor pusat. Kerusuhan ini menjadi salah satu insiden terburuk yang terjadi di Jakarta selama era Orde Baru, yang berujung pada tindakan represif dari pemerintah. Pemerintah lalu menuduh Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai pemicu kerusuhan. Meski Megawati dicopot dari posisi ketua oleh Suryadi dan pemerintah, insiden ini meningkatkan profil Megawati secara signifikan, memberinya simpati dan popularitas yang lebih luas di tingkat nasional.

Tasikmalaya, dikenal sebagai "kota santri" karena pengaruh politik Islam yang kuat, menampilkan dinamika politik yang menarik selama Pemilu 2019. Walaupun partai-partai Islam mendominasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berhasil memenangkan lima kursi dalam pemilihan legislatif di kota tersebut. PDIP menempati posisi ketiga, di belakang Partai Gerindra dengan

sepuluh kursi dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan sembilan kursi. Hasil ini menandakan adanya dukungan yang signifikan untuk PDIP di Tasikmalaya, yang menegaskan posisinya sebagai partai utama di wilayah itu.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperlihatkan ambisi yang kuat untuk bersaing dalam arena politik, termasuk di daerah yang dominan dengan politik Islam. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan daya saing di berbagai wilayah, partai ini mengimplementasikan strategi rekrutmen untuk menampilkan calon-calon berkualitas kepada masyarakat. Sebagai contoh, dalam pemilihan legislatif di Kota Tasikmalaya, PDI-P konsisten dalam menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kesuksesan ini menunjukkan keefektifan strategi partai dalam memilih dan mendukung kandidat yang berhasil mendapatkan dukungan signifikan dari para pemilih. Strategi rekrutmen yang efektif tidak hanya vital untuk memenangkan kursi legislatif, tetapi juga esensial untuk menjamin kompetisi yang sehat dan adil dalam setiap pemilihan, yang pada gilirannya akan menguatkan posisi partai dalam politik nasional.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sedang menjalankan proses rekrutmen politik untuk menyiapkan calon legislatif (caleg) bagi pemilihan umum 2024, baik di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dibandingkan dengan pemilu sebelumnya pada tahun 2014 dan 2019. Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh PDI-P, prioritas diberikan kepada anggota internal partai. Selain itu, PDI-P juga terbuka untuk menggaet individu

berpengaruh di masyarakat, termasuk tokoh yang ingin berpartisipasi dalam politik. Dodo Rosada menyatakan bahwa PDI-P sangat menyambut siapapun yang tertarik untuk menjadi caleg melalui partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri.

Dengan latar belakang tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menonjol sebagai partai besar dengan dukungan massa yang kuat di Kota Tasikmalaya. Hal ini dibuktikan dengan perolehan lima kursi oleh PDI-P dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya pada Pemilu 2019. Dari komposisi ini, penulis mengambil keputusan untuk meneliti pola rekrutmen PDI-P bagi calon anggota DPRD Kota Tasikmalaya di tahun yang sama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji proses dan strategi rekrutmen yang diterapkan PDI-P dalam menetapkan calon legislatif, sebagaimana diuraikan dalam karya ilmiah dengan judul “Pola Rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Studi Kasus dalam Penetapan Caleg DPRD pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Tasikmalaya),”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pola rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menetapkan calon anggota DPRD pada Pemilu tahun 2019 di Kota Tasikmalaya?”

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Mempertimbangkan bahwa topik mengenai pola rekrutmen partai politik adalah sangat luas, penelitian ini akan difokuskan pada pola rekrutmen politik yang

dijalankan oleh Partai PDI-P pada tingkat Dewan Pimpinan Cabang di Kota Tasikmalaya..

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan pola rekrutmen yang digunakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menetapkan calon anggota DPRD selama Pemilu 2019 di Kota Tasikmalaya, sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi penting untuk pengembangan ilmu politik, terutama dalam kajian partai politik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan ajar terkait partai politik dan menjadi fondasi untuk studi lebih mendalam mengenai mekanisme rekrutmen dalam partai politik.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi otoritas terkait untuk menilai proses rekrutmen di partai PDI-P Kantor Dewan Pimpinan Cabang Kota Tasikmalaya. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman stakeholder tentang proses rekrutmen politik, yang nantinya dapat diterapkan untuk memperbaiki kualitas rekrutmen di masa yang akan datang.